



Pemerintah Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

*jogja*  
istimewa

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016



## **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY**

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta

Telp. (0274) 562150, Fax. 2903

Website: [http://www.BadanKepegawaian](http://www.BadanKepegawaianDaerah.jogjapro.go.id)

[Daerah.jogjapro.go.id](http://www.BadanKepegawaianDaerah.jogjapro.go.id)

AYO  
KEJOGJA

# Kata Pengantar

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2016, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Yogyakarta, 28 Februari 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

R. AGUS SUPRIYANTO  
NIP 19600318 198603 1 012

# Ikhtisar Eksekutif

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Kepegawaian Daerah yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2012-2017. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihasilkan di tahun 2016, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ialah meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya aparatur, dengan indikator kinerja utamanya yaitu persentase kualitas manajemen sumberdaya aparatur. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 adalah 95,70% dari target 78,57%.

Di luar IKU, pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan indikator pendukung capaian sasaran program SKPD, yaitu Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD sebesar 100%

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan. Berkurangnya jumlah aparatur Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan oleh aparatur pensiun, tugas belajar serta kebijakan moratorium dari Pemerintah Pusat yang belum jelas kapan berakhirnya menyebabkan beban kerja yang lebih besar sebagai dampak dari perubahan kelembagaan baru.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1 Struktur Organisasi .....	dst
I.2 Fungsi dan Tugas	
I.3 Keadaan Pegawai	
I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana	
I.5 Keuangan	
I.6 Sistematika LKJ IP	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	
II.1.1 Visi dan Misi	
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	
II.1.3 Strategi	
II.1.3.1 Misi 1	
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016	
II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016	
II.3.1 Target Belanja Badan Kepegawaian Daerah	
II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	
II.4 Instrumen Pendukung	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Capaian Kinerja Tahun 2016	
III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	
III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya	
III.4. Akuntabilitas Anggaran	
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

# Daftar Tabel



Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .....
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....
Tabel II.3 Target Belanja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016.....
Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis.....
Dst .....

# BAB 1

## Pendahuluan

### **Bab 1 Berisi :**

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Keadaan Pegawai*
4. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
5. *Keuangan*
6. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah DIY.
2. Mendorong Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **I.1 Struktur Organisasi**

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Umum.
3. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari:
  - a. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan;
  - b. Subbidang Pengembangan Karier.
4. Bidang Mutasi, terdiri dari:
  - a. Subbidang Mutasi Jabatan;
  - b. Subbidang Kepangkatan dan Pensiun.
5. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan, terdiri dari:
  - a. Subbidang Kedudukan Hukum Pegawai;
  - b. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.
6. Bidang Tata Usaha Kepegawaian, terdiri dari:
  - a. Subbidang Dokumentasi;
  - b. Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional



## **I.2 Tugas dan Fungsi**

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2015 menetapkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
4. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten/ Kota;
5. Pelindungan dan pengembangan kebudayaan untuk sumberdaya manusia aparatur;
6. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

## **I.3 Keadaan Pegawai**

Jumlah pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2016 sebanyak 102 orang dan 3 orang PNS titipan. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin sebagai berikut :

**Tabel I.1**  
**Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah		Jumlah Total
		Laki- laki	Perempuan	
1.	Kepala Badan Eselon II.a	1	0	1
2.	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai Eselon III.a	5	1	6
3.	Kepala Subbag/Subbid/Seksi Eselon IV.a	5	9	14
4.	Fungsional Umum	42	39	81
5.	Fungsional Tertentu	0	3	3

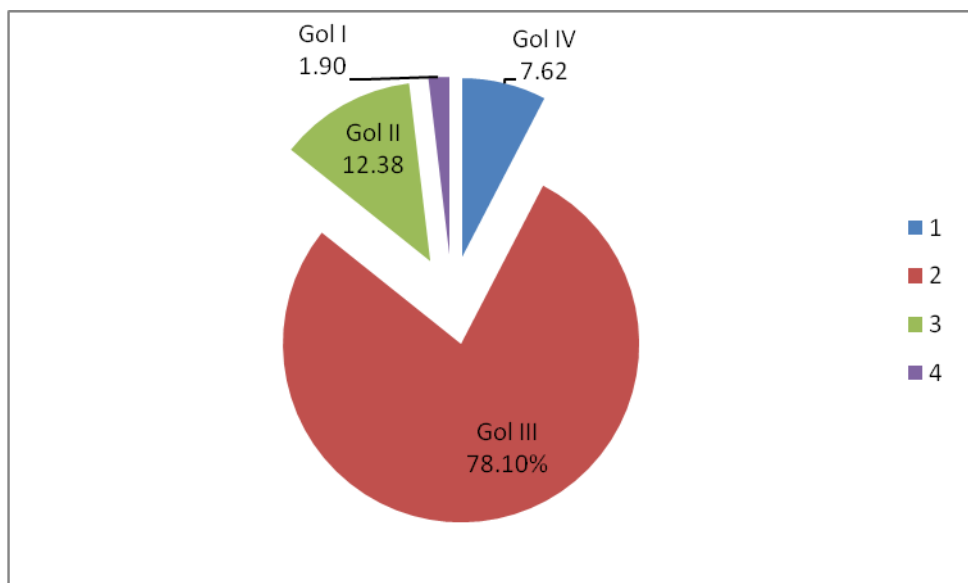
*Sumber data : Sistem Informasi Kepegawaian Pemda DIY per 31 Desember 2016*

**Tabel I.2**  
**Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Golongan**

Jenis Kelamin	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Laki-laki	7	34	10	2	53
Perempuan	1	48	3	0	52
Jumlah	8	82	13	2	105
Persen thd total (%)	7,62	78,10	12,38	1,90	100

*Sumber data : Sistem Informasi Kepegawaian Pemda DIY per 31 Desember 2016*

**Grafik I.1**  
**Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Golongan**

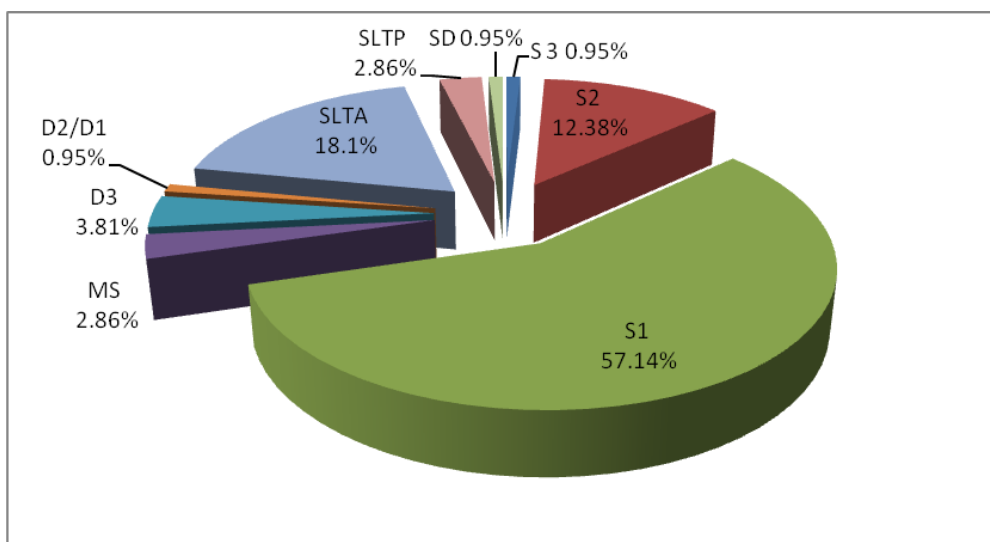


**Tabel I.3**  
**Kondisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

Uraian	Tingkat Pendidikan									Jumlah
	S3	S2	S1	MS	D3	D2/D1	SLTA	SLTP	SD	
Laki-laki	1	7	26	0	3	0	13	3	0	53
Perempuan	0	6	34	3	1	1	6	0	1	52
Jumlah	1	13	60	3	4	1	19	3	1	105
Persen thd total (%)	0,95	12,38	57,14	2,86	3,81	0,95	18,10	2,86	0,95	100,00

*Sumber data : Sistem Informasi Kepegawaian Pemda DIY per 31 Desember 2015*

**Grafik 1.2**  
**Jumlah Pegawai BKD DIY Menurut Pendidikan**



Sedangkan jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan seperti dalam tabel berikut :

**Tabel I.4**  
**Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan**

No	Uraian	Jumlah Formasi Yang Dibutuhkan	Jumlah Pegawai Yang Ada
1.	Kepala Badan Eselon II.a	1	1
2.	Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Balai Eselon III.a	6	6
3.	Kepala Subbag/Subbid/Seksi Eselon IV.a	14	14
4.	Fungsional Umum	126	84
Jumlah		147	105

Sumber data : Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012

#### I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Lokasi kantor Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di luar kompleks Kepatihan berpengaruh terhadap volume kebutuhan barang dan jasa yang digunakan. Barang dan jasa yang diperlukan meliputi penggunaan untuk operasional kegiatan dan pemeliharaan sarana yang dimiliki. Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan Badan Kepegawaian Daerah kepada masyarakat. Nilai aset yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 14.954.408.008,21 terdiri atas **aset lancar** sebesar Rp. 50.825.110,00 **aset tetap** sebesar Rp. 13.531.561.998,21 dan **aset lainnya** Rp. 1.372.020.900,00 Sarana dan prasarana yang dikelola per Desember 2016 sebagai berikut :

**Tabel I.5**

**Jumlah Dan Kondisi Riil Sarana dan Prasarana**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	1	Jl Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta  52 Ruang (Gedung BKD dan Balai PKP) dan 1 Gedung Arsip
2.	Alat-alat Besar	6	
3.	Alat-alat Angkutan	13	
4.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1	
5.	Alat-alat Pertanian/Perternakan	1	
6.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.438	
7.	Alat-alat Studio dan Komunikasi	194	
8.	Bangunan Gedung	52	
9.	Instalasi	2	
10.	Jaringan	1	
11.	Buku Perpustakaan	1.729	
12.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	32	

*Sumber data : Laporan Neraca BKD DIY TA 2016*

Sedangkan jumlah ideal sarana dan prasarana kantor yang harusnya tersedia untuk menunjang dan mendukung program kegiatan dibandingkan dengan beban

pekerjaan disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2008 seperti dalam tabel berikut :

**Tabel I.6**  
**Jumlah ideal Sarana dan Prasarana dibandingkan dengan beban pekerjaan**

No.	Uraian Sarana dan Prasarana	Menurut Pergub	Kondisi Yang Ada
I	Kebutuhan Ruang Kantor Umum		
1.	Ruang Tamu	ada	Ada
2.	Ruang Rapat	ada	Ada
3.	R. P. Keuangan	ada	Ada
4.	R. Arsip	ada	Tidak Ada
5.	R. Perpustakaan	ada	Ada
6.	R. Gudang	ada	Ada
7.	R. Komputer	ada	Ada
8.	R. Pos Keamanan	ada	Ada
9.	R. Kantin	ada	Ada
10.	R. Mushola	ada	Ada
11.	Kamar Mandi/Toilet	ada	Ada
12.	R. Assesment	ada	Ada
II.	Perlengkapan R. Kantor Eselon II		
1.	Ruang Kerja	ada	Ada (tidak standar)
2.	Ruang Tamu	ada	Ada
3.	Ruang Rapat	ada	Ada
III.	Perlengkapan R. Kerja Eselon III	ada	Ada
IV.	Perlengkapan R. Kerja Eselon IV	ada	Ada (tidak standar)
V.	Perlengkapan R. Kerja Pejabat Fungsional Umum/Staf		Ada
VI.	Kebutuhan Kendaraan :		
1.	Kendaraan Kepala Dinas/Badan	1	1
2.	Kendaraan Dinas Operasional	6	6
3.	Kendaraan Roda 2	6	5

*Sumber data : Peraturan Gubernur DIY No. 26 Tahun 2008*

## I.5 Keuangan

Penyelenggaraan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan plafon anggaran APBD DIY tahun anggaran 2016. Rincian alokasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah DIY tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel I.7**  
**Jumlah Anggaran yang Dikelola**

No.	Uraian	Anggaran
I.	Belanja Tidak Langsung	88.188.566.868,-
1.	Gaji dan Tugasan	5.806.397.768,-
2.	Tambahan Penghasilan PNS	82.354.682.800,-
3.	Biaya Insentif Retribusi Daerah	27.486.300,-
II.	Belanja Langsung	14.243.288.280,-
1.	Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.000.178.800,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	743.965.480,-
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	145.226.000,-
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	7.547.315.000,-
5.	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemda	3.806.603.000,-
JUMLAH		102.431.855.148,-

*Sumber data : DPPA BKD DIY TA 2016*

## **I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 adalah sebagai berikut :

### **Ikhtisar Eksekutif**

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/manfaat LKj IP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Potensi yang menjadi ruang lingkup Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sistematika penulisan LKj IP.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah

## **LAMPIRAN**



# BAB 2

## Perencanaan & Perjanjian Kinerja

### **Bab 2 Berisi :**

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2016*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2016*
4. *Instrumen Pendukung*

### **II.1 Perencanaan Strategis**

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selama empat tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Evaluasi Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2014 menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir RPJMD.

Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan terhadap RPJMD 2012-2017 berdasarkan amanat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Selaras dengan perubahan RPJMD 2012-2017 menimbulkan konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2012-2017, yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 058/0653/PDTI/2015 Tentang Rencana Strategis (Reviu) Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017, Tanggal 26 Januari 2015. Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran Badan Kepegawaian Daerah sebagai penjabaran sasaran dan indikator Gubernur dalam perubahan RPJMD. Hasil perubahan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan

dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD. Perubahan yang dilakukan tercantum dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **II.1.1 Visi dan Misi**

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan menyangkut ke mana Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisi cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Mengacu pada Visi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017 yakni ***“Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”***, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012 - 2017 yaitu:

#### ***“Menjadi Pengelola Kepegawaian yang Profesional dan Berbudaya”***

Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut:

#### ***“Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen sumberdaya aparatur”***

### II.1.2 Tujuan dan Sasaran

#### Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah selama 5 tahun anggaran adalah :

**Mewujudkan Peningkatan kualitas manajemen sumberdaya aparatur**

#### Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1**

**Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2012	2013	2014	2015	2016	TARGET AKHIR 2017	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya aparatur	Persentase kualitas manajemen sumberdaya aparatur	persen	-	-	-	79.03	78.57	80.96	Perubahan dimulai tahun 2015

### II.1.3 Strategi

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

#### II.1.3.1 Misi 1. Terwujudnya peningkatan kualitas manajemen sumberdaya aparatur

##### ❖ Strategi

Strategi untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dirumuskan dalam *grand design* pengelolaan

manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem rekrutmen pegawai
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
3. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi
4. Mengembangkan pola karir pegawai
5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai
6. Membentuk pegawai yang berkarakter dan melestarikan budaya
7. Mengembangkan sistem informasi kepegawaian secara terintegrasi
8. Meningkatkan mutu layanan dan jejaring kerja Balai pengukuran kompetensi pegawai
9. Pelaksanaan kenaikan pangkat pegawai
10. Meningkatkan pengelolaan pensiun pegawai
11. Meningkatkan sarana dan prasarana

❖ **Kebijakan**

1. Mewujudkan perencanaan dan pengadaan sumber daya aparatur yang transparan, obyektif dan profesional.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dengan pengiriman aparatur dalam tugas belajar, pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional kepemimpinan.

3. Menyediakan dukungan administrasi, sarana dan prasarana perkantoran secara lebih memadai.

❖ **Program**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemda.

❖ **kegiatan**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - g) Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - h) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - i) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - j) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - k) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - l) Penyediaan Makanan dan Minuman
  - m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
  - n) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja
  - o) Pengelolaan Arsip Dinamis

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a) Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
  - b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - c) DED Pembangunan Gedung Kantor
  - d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
  - e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
  - f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  - g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
  - h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
  - i) Fumigasi Arsip
3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
  - b) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
  - c) Penyusunan Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
  - d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
  - a) Pengembangan Aparatur
  - b) Pengukuran Kompetensi Pegawai
  - c) Pengembangan Kemitraan Pengukuran Kompetensi
  - d) Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur
  - e) Pengelolaan Kepangkatan
  - f) Penegakan Disiplin Aparatur
  - g) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur
  - h) Penghargaan dan Kesejahteraan Aparatur
  - i) Pengelolaan Jabatan
  - j) Pemulangan Pegawai yang Pensiun

- k) Perpindahan Aparatur
- l) Pembangunan Database Informasi Kearsipan Aparatur
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemda.
  - a) Pengembangan ISO
  - b) Pengembangan Profesional Aparatur
  - c) Pengembangan SDM Assessor

## II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2016:

**Tabel II.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2016**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya aparatur	Persentase kualitas manajemen sumberdaya aparatur	Persen	78.57	I	0
					II	0
					III	0
					IV	78.57%

Target dari indikator kinerja sasaran yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta baru dapat dihitung di akhir tahun dikarenakan bahan yang dipakai sebagai alat ukur baru terkumpul di akhir tahun. Pada awal tahun, kebutuhan formasi masih dalam tahap usulan ke Pemerintah Pusat sehingga belum bisa dipastikan angka yang dijadikan acuan. Rekap kesesuaian dalam penempatan jabatan merupakan satu kesatuan dalam perhitungan, sehingga tidak dapat dipisah-pisah untuk penghitungannya, di samping adanya kebijakan yang seringkali menyertai setiap pengambilan keputusan.

### II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016

Pada Tahun Anggaran 2016 Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp103.970.232.907,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2016 menjadi Rp.102.431.855.148,-dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp88.619.030.547,- dan Belanja Langsung Rp14.243.288.280,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp100.520.543.205,- (98,13%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp87.735.198.067,- (99,49%) belanja langsung sebesar Rp12.785.345.138,- (89,76%).

#### II.3.1 Target Belanja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

**Tabel II.3**

**Target Belanja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016**

Uraian	Target	Prosentase
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	Rp.88.188.566.868,-	100%
<b>Belanja Langsung</b>	Rp.14.243.288.280,-	100%
<b>Jumlah</b>	Rp.102.431.855.148,-	100%

#### II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:



**Tabel II.4**  
**Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis**

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya aparatur	Rp14.243.288.280,-	78.58	Formula : Jumlah formasi jabatan yang terisi dibagi jumlah kebutuhan pegawai dikali 100% ditambah jumlah pemenuhan kriteria dalam analisis jabatan oleh kompetensi individu dikali 100% dibagi dua.

#### **II.4 Instrumen Pendukung**

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, maka Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengembangkan beberapa kegiatan dan aplikasi, yaitu :

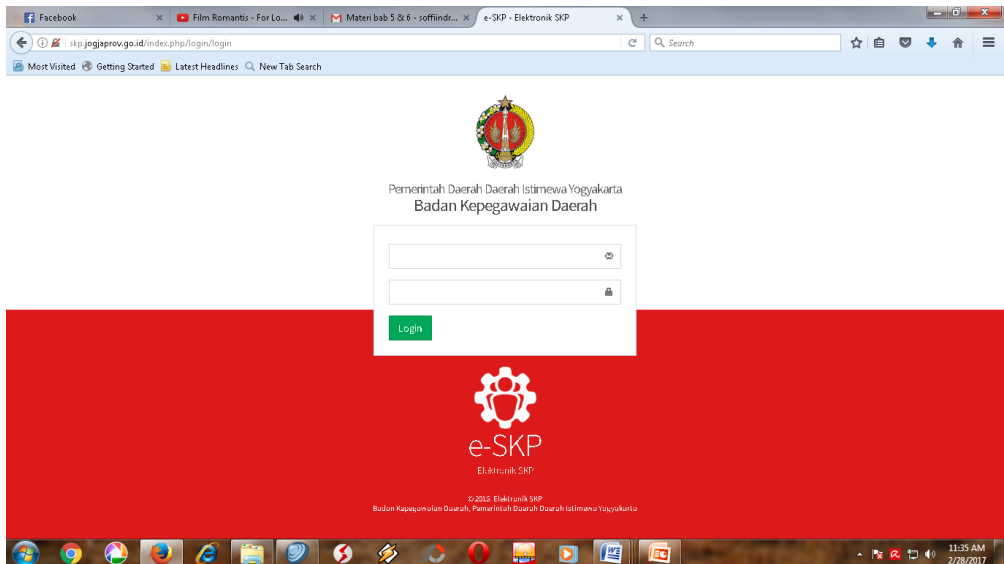
1. Penilaian manajemen mutu ISO 9001:2015. Penilaian manajemen mutu ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi ISO yang telah diterima oleh Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, bidang-bidang layanan yang telah mendapatkan sertifikasi ISO meliputi :
  - a) Layanan kenaikan pangkat PNS
  - b) Layanan pengukuran kompetensi pegawai
  - c) Layanan pengelolaan mesin presensi elektronik
  - d) Layanan pengelolaan kartu pegawai, kartu suami, kartu istri dan kartu peserta taspen
  - e) Layanan pemrosesan ijin belajar PNS
  - f) Layanan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS
  - g) Layanan penilaian kinerja aparatur daerah

- h) Layanan pengangkatan CPNS
- i) Layanan Layanan pindah tugas PNS
- j) Layanan surat menyurat Badan
- k) Layanan pelaporan keuangan Badan
- l) Layanan pelaporan kinerja Badan



## 2. Aplikasi E-SKP

E-SKP atau elektronik sasaran kinerja pegawai adalah sistem yang dirancang untuk pengolahan data SKP serta penilaiannya. Dengan e-SKP ini, tiap instansi dapat menyelenggarakan penilaian SKP secara elektronik dengan sasaran Pegawai Negeri Sipil dalam instansi tersebut. Pengguna e-SKP adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di mulai dari struktur tertinggi instansi sebagai level tertinggi sampai pada staf sebagai level terbawah.



Facebook

Film Roberts - For Lo... x

Materi bab 5 & 6 - xoffindr... x

e-SKP - Elektronik SKP

ikp.jogiprov.go.id/index.php/ikp/ikp\_wsl/editor/ikp/YtoyOwtzOjMlmlk&zOjQlYwODEiOjM6Mzoi6v6F8t&zOjMlmlkYHQ-

Search

Most Visited

Getting Started

Latest Headlines

New Tab Search

Pengukuran SKP

Tugas Tambahan

Laporan Harian

Penilaian Perilaku SKP

Banding Nilai SKP

Laporan

USUL

25/01/2017

VERIFIKASI

26/01/2017

NO

I. PEJABAT PENILAI

NO

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DI NILAI

1

Nama

RIANA SETYAWATI

1

Nama

SOFFI INDIRYANI

2

NIP

196012241996032001

2

NIP

198005012005022001

3

Pangkat/Gol. Ruang

Penata Tingkat I - III/d

3

Pangkat/Gol. Ruang

Penata Muda Tingkat I - III/b

4

Jabatan

Kepala Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi, Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi

4

Jabatan

Analisis Perencanaan Program dan Anggaran, Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi

5

Unit Kerja

Badan Kepegawaian Daerah

5

Unit Kerja

Badan Kepegawaian Daerah

NO

I KEGIATAN TUGAS JABATAN

AK

TARGET

TARGET PERIODIK (BULAN)

1

Aksi

Monev KTJ/Asas  
Mempelajari dan menelaah regulasi, pedoman, kebijakan, dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas

0

12 Buku

100

12 Bulan

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Aksi

Monev KTJ/Asas  
Mengumpulkan data program dan kegiatan

0

2 Dokumen

100

4 Bulan

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

13:36 AM

2/28/2017

### 3. SI SEKSI PERINTAH SISTER (SISTEM SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH BERBASIS KOMPUTER)

Merupakan sistem seleksi pegawai pemerintah berbasis computer. Hal ini berkenaan dengan program percepatan reformasi birokrasi yang ke 3 yaitu sistem seleksi dan promosi secara terbuka mengandung maksud bahwa seleksi tersebut harus dilakukan dengan prinsip **terbuka, transparan, profesional**, dan

**sesuai kebutuhan.** Terbuka bermakna setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses rekrutmen. Transparan berarti semua tahapan prosesnya bisa diketahui oleh setiap peserta maupun publik, termasuk kriteria penilaian untuk menentukan diterima atau tidaknya calon aparatur dimaksud. Profesional diartikan bahwa seluruh proses rekrutmen dilaksanakan sesuai standar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta berlangsung jujur. Sesuai kebutuhan, maksudnya, seleksi itu berdasarkan pada analisis kebutuhan pegawai yang dilakukan secara obyektif.

## Daftar Peserta

-- Pilih Formasi --

Cari Peserta ...

Cari

+ Tambah Peserta













Cetak Tabel

No Induk	No Peserta	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	Email	jurusan	
1111	1111	Nimas Dewi	10/11/2014	nimas_dewi24@ymail.com	Tenaga Guru	  <input type="checkbox"/>
1121	xxx	Reza Raharjo	10/11/2014	nurrhariyadi@yahoo.com	Tenaga Kesehatan	  <input type="checkbox"/>
1122	09.11.3390	Nur Rahman	10/11/2014	nur_rahman@gmail.com	Tenaga Kesehatan	  <input type="checkbox"/>
1212	09.11.3393	Dwi Ananto	10/11/2014	dwi_ananto@yahoo.com	Tenaga Teknis	  <input type="checkbox"/>

## Manajemen Soal

✓ Buat Soal

+ Buat Paket Soal

Paket Soal	Tanggal	Jumlah Soal	Batasan	
Wawasan Kebangsaan	10/11/2014	8	30	    <input type="checkbox"/>
Intelegensial Umum	00/00/0000	8	30	    <input type="checkbox"/>
Kepribadian	00/00/0000	7	40	    <input type="checkbox"/>
				Centang Semua <input type="checkbox"/>

Total

3

## Manajemen Ujian

+ Atur Ujian

Nama	Tanggal Ujian	Waktu	Poin Benar	Poin Salah	Presentase (%)	
Sesi 1	23/12/2014	120 Menit	1	0	100	  <input type="checkbox"/>
sesi 2	23/12/2014	120 Menit	1	0	100	  <input type="checkbox"/>
sesi 3	23/12/2014	120 Menit	1	0	100	  <input type="checkbox"/>
sesi 4	23/12/2014	120 Menit	1	0	100	  <input type="checkbox"/>

Total 4

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### **Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2016*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Akuntabilitas Anggaran*

### **III.1. Capaian Kinerja Tahun 2016**

Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2016 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel III.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel III.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2016**

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya aparatur	Persentase kualitas manajemen sumberdaya aparatur	Persen	78,58	75,19	95,69	Hijau Tua

Dari tabel di atas, terdapat satu indikator kinerja utama yang terbagi ke dalam satu sasaran strategis. Pada tahun 2016, indikator kinerja memiliki capaian sebesar 75,19% atau sebesar 95,70% dari target yang ditetapkan sebesar 78,57%.

### **III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### **III.2.1. Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas manajemen sumberdaya aparatur**

Tolok ukur capaian sasaran persentase kualitas manajemen sumber daya aparatur terdiri dari 2 indikator program, yaitu:

- a. Prosentase pemenuhan kompetensi aparatur dengan formulasi perhitungan jumlah pemenuhan kriteria dalam analisis jabatan oleh kompetensi individu dibagi jumlah formasi yang sudah terisi dikali 100%.

Jumlah pemenuhan kriteria  

$$\frac{\text{dalam analisis jabatan oleh kompetensi individu}}{\text{Jumlah formasi yang sudah diisi}} \times 100\%$$

Indikator ini didukung oleh program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemda, dan;

- b. Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur dengan formulasi perhitungan jumlah formasi jabatan yang terisi dibagi jumlah kebutuhan pegawai dikali 100% didukung oleh program pembinaan dan pengembangan aparatur.

$$\frac{\text{Jumlah formasi jabatan yang terisi}}{\text{Jumlah kebutuhan pegawai}} \times 100\%$$

**Tabel III.3**  
**Target dan Realisasi Kinerja**

No	Indikator	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2016 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur	62,60	70	73,26	104,66	75	97,68
2.	Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur	68,89	87,15	77,12	88,49	86,92	88,73



Capaian tahun 2016 indikator program persentase pemenuhan kompetensi aparatur adalah 5.160 dibagi 7.043 dikali 100% adalah 73,26%. Hasil yang dicapai melebihi target yang ditetapkan yaitu 70%. Sedangkan indikator program persentase pemenuhan kebutuhan aparatur adalah 7.643 dibagi 9.911 dikali 100% adalah 77,12%, tidak bisa mencapai target dikarenakan adanya kebijakan moratorium dari Pemerintah Pusat.

Capaian atas indikator program yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- indikator program persentase pemenuhan kompetensi aparatur tahun 2016 tercapai 73,26% dari target 70% atau sekitar 104,66%. Sedangkan di tahun 2015 capaiannya adalah 62,60% dari target 65% atau sekitar 96,31%. Jadi kinerja indikator program ini mengalami kenaikan, yaitu sekitar 8,35%. Capaian tahun 2016 terhadap target tahun 2017 adalah 97,68%, yaitu 73,26% dari target 75%.
- indikator program persentase pemenuhan kebutuhan aparatur tahun 2016 tercapai 77,12% dari target 87,15%, atau sekitar 88,49%. Sedangkan capaian tahun 2015 adalah 68,89% dari target 79,03%, atau sekitar 87,17%. Jadi kinerja indikator program ini mengalami kenaikan, yaitu sekitar 1,32%. Capaian tahun 2016 terhadap target tahun 2017 adalah 88,73%, yaitu 77,12% dari target 86,92%.

Capaian indikator kinerja sasaran Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami kenaikan mesti tingkat kenaikannya tidak begitu banyak. Tahun 2015 memperoleh capaian sebesar 83,18% dan tahun 2016 95,69%. Berikut ini adalah faktor-faktor penghambat indikator kinerja presentase kualitas manajemen sumber daya aparatur terhadap target yang telah ditetapkan di tahun 2016, yaitu :

- 1) Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat tentang pemberlakuan moratorium pegawai selama tahun 2016, sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai. Kebijakan penundaan penambahan pegawai tahun 2016 mengacu pada surat Menpan-RB RI Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang moratorium pegawai.

- 2) Untuk kesesuaian formasi dengan kompetensi individu belum bisa maksimal karena selama ini, pengukuran kompetensi hanya diperuntukkan bagi Pejabat eselon III yang telah memenuhi syarat dan akan menduduki jabatan yang lebih tinggi, sehingga kompetensi individu masing-masing pegawai masih berdasarkan tingkat pendidikan, diklat dan pelatihan teknis.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana yang masih jauh dari ideal. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan skala prioritas khususnya dalam hal pembangunan gedung.

Sementara faktor-faktor yang menjadi pendukung dari indikator kinerja presentase kualitas manajemen sumber daya aparatur tahun 2016 adalah:

- 1) Pengukuran kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan data potret potensi pegawai yang lebih cepat dan dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Koordinasi dalam kaitannya dengan penataan pegawai untuk mendukung penataan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta kemampuan individu.
- 3) Koordinasi secara berkala untuk menetapkan prioritas program kegiatan dukungan sehingga semua bisa berjalan dengan lebih baik.
- 4) Penambahan alokasi dana untuk pengembangan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam kaitannya dengan peningkatan pendidikan formal yaitu pengiriman pegawai dalam tugas belajar dan ijin belajar maupun nonformal seperti diklat teknis fungsional, pelatihan serta kursus-kursus.
- 5) Seleksi pegawai non PNS atau honorer untuk mengatasi kekurangan pegawai di SKPD-SKPD.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja persentase kualitas manajemen sumber daya aparatur serta solusi yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Penataan kelembagaan baru yang membutuhkan penanganan khusus dalam kaitannya dengan penataan pegawai yang ada. Dengan adanya penataan kelembagaan baru, maka dilakukan juga penataan pegawai untuk mengisi kekosongan yang ada.
- 2) Melakukan pembinaan, pengembangan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan penambahan alokasi anggaran untuk pengiriman aparatur dalam tugas belajar maupun ijin belajar serta diklat teknis, pelatihan dan kursus yang mendukung kinerja aparatur.
- 3) Pengalihan guru serta tenaga administrasi SMU/SMK yang sebelumnya ada di Kabupaten/kota. Pengalihan tenaga guru maupun administrasi dari SMU/SMK yang berasal dari Kabupaten/kota membutuhkan pendataan yang lebih teliti serta rinci untuk mendapatkan kepastian jumlah. Menyiapkan segala keperluan yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa menyiapkan sistem kepegawaiannya, pakaian dinas, kartu pengenalnya maupun mesin presensi yang nantinya digunakan dalam pengawasan pegawai. Untuk tahun 2016, pendataan sudah selesai dilakukan dan tindak lanjut di tahun 2017 adalah penyiapan sarana dan prasarana yang mendesak, yaitu mesin presensi serta penataan arsip kepegawaian yang ada.
- 4) Adanya kebijakan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan penerimaan pegawai sehingga menyebabkan jumlah pegawai yang ada semakin berkurang karena pensiun dan tugas belajar maupun sebab lainnya. Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan koordinasi tentang penerimaan pegawai dengan pihak-pihak terkait untuk dapat memenuhi formasi yang masih belum terisi yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Melakukan penghitungan ulang tentang formasi yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta dilakukan rekrutmen pegawai nonPNS melalui seleksi untuk

mengurangi kekosongan yang ada di masing-masing SKPD meskipun tidak bisa secara keseluruhan terisi. Formasi yang terisi oleh nonPNS sebanyak 814 orang.

- 5) Adanya kebijakan dalam pemilihan atau penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi dengan menggunakan seleksi terbuka sebagai implementasi dari Undang-undang ASN. Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menyiapkan anggaran dalam kaitannya dengan seleksi terbuka, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta menguatkannya dengan membuat regulasi yang mendukung kegiatan tersebut. Dalam seleksi ini sudah terpilih JPT sebanyak 9 orang.

### **III.3 Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 98,13%. dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 88,55%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94,52%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.4**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2016**

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya aparatur	78,58	75,19	95,69	100	88,55	88,55
<b>Jumlah</b>		<b>58,78</b>	<b>68,28</b>	<b>86,89</b>	<b>100</b>	<b>88,55</b>	<b>88,55</b>
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>58,78</b>	<b>68,28</b>	<b>86,89</b>	<b>100</b>	<b>88,55</b>	<b>88,55</b>

Tabel III.5

**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2016**

(yang mendukung capaian sasaran strategis)

No	Program	Anggaran*			Keterangan
		Target	Realisasi	% Deviasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	7.547.315.000	6.358.119.741	15.76	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kebijakan efisiensi dan pembintangan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran</li> <li>- Adanya kebijakan moratorium dari pemerintah pusat</li> </ul>
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemda	3.806.603.000	3.696.076.435	2.9	Adanya kebijakan efisiensi dan pembintangan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran
<b>Jumlah</b>		<b>11.353.918.000</b>	<b>10.054.196.176</b>	<b>18.66</b>	
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>11.353.918.000</b>	<b>10.054.196.176</b>	<b>18.66</b>	

*Sumber Data : DPPA BKD DIY Tahun 2016*

Efisiensi dilakukan terhadap kegiatan yang ada potensi untuk tidak dilaksanakan dengan prioritas kegiatan yang dianggarkan di triwulan 4 (empat). Kegiatan-kegiatan itu meliputi kegiatan seleksi penerimaan CPNS, perjalanan dinas luar daerah serta kegiatan seleksi jabatan tinggi pratama yang sedianya dilaksanakan di tahun 2016 namun tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi serta pertimbangan lainnya dari Gubernur.

# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Saran*

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2016 merupakan tahun ke 5 (lima) dari Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari analisis terhadap sasaran, terdapat satu indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2016, indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah dapat mencapai target sebesar 95,70% dari total indikator yaitu sebesar 78,57%. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala, baik dari dalam internal maupun eksternal Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kendala yang paling besar dan tidak dapat dihindarkan adalah adanya moratorium penerimaan pegawai dari pemerintah pusat.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait.
2. Memberikan perhatian khusus atas program/kegiatan yang mendukung indikator kinerja sasaran untuk bisa mencapai target sesuai dengan harapan.

3. Melaksanakan pengembangan pegawai di bidang pendidikan serta kompetensi untuk menunjang kegiatan.
4. Melakukan alternatif penyelesaian kekurangan pegawai dengan seleksi penerimaan pegawai non PNS.



**DAFTAR LAMPIRAN:**

Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5. Penghargaan yang pernah diterima

Lampiran 6. Sertifikasi ISO 9001:2015

